

	News Title : Banyak Investor Berjangka Komoditas Tak Paham Konsep Untung Rugi	
	Media Name : Kompas.id	Journalist : Erika Kurnia
	Publish Date : 01 November 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 4,500,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Yeka Hendra Fatika (Anggota Ombudsman RI)	Ads Value : 1,500,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic :

Banyak Investor Berjangka Komoditas Tak Paham Konsep Untung Rugi

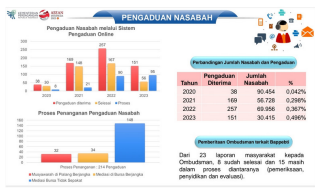
Manayarat yang alami kerugian saat berinvestasi ada yang menuntut ganti rugi atau menuntut kecurangan kepada perusahaan piutang atau Bappebti.

Audio Berita 7 menit

Oleh ERIKA KURNIA

1 November 2023 18:01 WIB - 4 menit baca

A. TIMES



Adapun nasabah terkait produk perdagangan berjangka komoditas Sistem Perdagangan Alternatif melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

JAKARTA, KOMPAS –Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti menerima kurang dari 1 persen pengaduan nasabah perdagangan berjangka komoditas Sistem Perdagangan Alternatif setiap tahunnya. Pengaduan yang ditangani mayoritas terkait ketidakpahaman nasabah terhadap aturan perdagangan tersebut.

Pada 2023, ada 151 nasabah (0,49 persen) yang membuat pengaduan dari total 30.415 nasabah. Tahun sebelumnya, pada 2022, sebanyak 237 nasabah dari total 69.956 nasabah (0,36 persen) membuat aduan. Aduan ini terkait Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), seperti di perdagangan atau [lindung nilai](#) indeks emas, indeks valas, dan indeks harga saham.

Selama dua tahun, masih ada 185 aduan yang berproses. Mayoritas bursa tidak seepak, sebagian kecil masih di tahap musyawarah dengan piutang atau media di bursa berjangka.

Kepala Bappebti periode 2022-2023, Didid Noordiatmoko, ditemui di Jakarta, mengatakan, sebagian besar pengaduan yang sudah mereka klasifikasi terkait masalah ketidakpahaman nasabah pada produk berjangka komoditas itu. "Mereka harus paham SPA. Kenyataannya, banyak yang tidak paham, tetapi tanda tangan (kontrak). Kalau sudah tanda tangan, kan, ada perikatan," kata pria yang mengahiri statusnya sebagai pejabat tinggi lembaga itu hari ini, Rabu (1/11/2023).

Baca juga: [Daurat Pengawasan dan Edukasi Perdagangan Komoditas](#)



Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) periode 2022-2023, Didid Noordiatmoko, menyampaikan konferensi pers ke media massa bertema 'Perdagangan Berjangka Komoditi' di Gedung IBI, di kantornya, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Perindakan Bappebti Aldison menambahkan, aduan itu banyak dilayangkan ketika nasabah mengalami kerugian saat berinvestasi. Mereka lalu menuntut ganti rugi atau menuntut kecurangan kepada perusahaan piutang atau Bappebti selaku pengawas perdagangan berjangka komoditas.

"Sekarang, kan, banyak tawaran (investasi) lewat iklan masuk ke kita. Kemudian, kita tertarik mentransfer sejumlah uang ke akun itu. Kalau enggak terjadi (keuntungan), kita akan marah karena janji tidak terpenuhi atau tidak sesuai yang diiklankan. Setelahnya itu sebenarnya pengaduan-pengaduan yang terjadi," paparnya saat ditemui di kantornya.

Bagaimana pun, katanya, Bappebti akan menerima apa pun aduan nasabah ke mereka dan membantu menyelesaikan perselisihan secara perduta.

Serangkaian pemerkasan akan dilakukan kepada nasabah itu sendiri dan perusahaan piutang lewat negosiasi sebelum naik ke tahap media bursa.

Ketika media bursa tidak tercapai, Bappebti akan melakukan prosedur pemerkasan. Dari situ, bisa terbit sanksi administratif, penyidikan, hingga pengadilan perduta atau bahkan pidana di lembaga peradilan.



Tamu undangan berted di depan logo Commodity Future Exchange (CFX) saat acara penutupan bursa saat Minggu Indonesia di Jakarta, Jumat (24/10/2023).

Mitigasi potensi kerugian

Untuk mengurangi pengaduan-pengaduan tersebut, Didid menjelaskan, ia sempat melakukan monitoring perizinan SPA selama setahun sampai Agustus 2023. Selama periode itu, Bappebti memantapkan Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

Didid mengatakan, beleid itu antara lain memuat perubahan sistem penandatanganan kontrak oleh nasabah di sistem yang disediakan perusahaan piutang.

"Itu kami perbaiki dengan membuat *voice and face recognition*, mereka baca (aturan), kita rekam. Kami berupaya agar orang enggak kecebel, baca dulu dan di-record (direkam). Itu supaya yang enggak tahu-memahu enggak asal main aja," ujarnya.

Perbaikan lainnya juga banyak ditekankan pada perusahaan piutang. Pertama, memperbaiki struktur permodalan dari pelaku SPA untuk meningkatkan kualitasnya. Permodalan bagi penyelenggara SPA sejumlah Rp 40 miliar dan untuk mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp 35 miliar. Sementara, bagi peserta SPA, modal diotori senilai Rp 30 miliar dan mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp 25 miliar.

Bappebti juga melakukan pengawasan dengan sistem rating terhadap pialang. Penilaian antara lain berdasarkan kinerja, sedikitnya pengaduan, dan penanganan pengaduan yang baik. Selain itu, pelaku SPA juga wajib memperbaiki sistem mereka dengan sertifikasi ISO 27001.

"Artinya, kalau ada ISO itu, aplikasi sudah *certified*. Kalau dia (perusahaan) intervensi macam-macam, akan keliatan di situ. Ini untuk menjaga dari kecurangan-kecurangan oleh para pelaku perdagangan berjangka," kata Didid.

Sistem tersertifikasi itu, dicontohkan Didid, dapat mencegah kecurangan, seperti sistem menolak order transaksi (*reject*), sistem terlambat mengeksekusi order (*delay*), dan sistem menggandakan order dari yang diperintahkan dua menjadi empat order transaksi (*split*).

Baca Juga: [Temuan Maladministrasi soal Perizinan Kripto Dikaji](#)

Kecurangan tersebut menjadi temuan dalam kasus yang dilaporkan investor bernama Sugiarto Hadi. Pada 2014, ia rugi hingga Rp 34 miliar saat berinvestasi perdagangan valuta asing atau *trading foreign exchange* (forex) melalui platform Metatrader. Sugiarto terdaftar sebagai pelaku pasar di PT MIF dan PT SAM.



KOMPAS/AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

Kuasa hukum Sugiarto Hadi, Rocky Nainggolan (kiri), mendampingi kliennya, Sugiarto Hadi (kanan), yang hadir dalam konferensi pers Ombudsman RI terkait Maladministrasi Bappebti dalam Penyelesaian Kerugian Masyarakat akibat Kecurangan Perusahaan Pialang dan Pedagang dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, di Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Kecurangan itu terbukti juga setelah kerugian dilaporkan ke Ombudsman sejak 2022. Kasus Sugiarto menjadi satu dari 29 kasus yang diterima Ombudsman dari nasabah yang mengadukan kecurangan di perusahaan pialang terhadap Bappebti. Ombudsman menyebut, pelapor itu mengalami kerugian total Rp 100 miliar.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Senin (30/11/2023), menyampaikan, Bappebti memiliki tiga potensi malaadministrasi akibat laporan-laporan tersebut, yaitu pengabaian kewajiban hukum, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut. Hal ini didasarkan pada Pasal 68 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

"Bappebti diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditas berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," kata Yeka.